

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Menulis tinjauan literatur merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian. Tinjauan literatur dapat diartikan sebagai suatu survei yang mencakup pengetahuan terbaru mengenai topik atau isu yang menjadi fokus penelitian penulis. Dari tinjauan literatur ini peneliti dapat mengetahui apa yang sudah diidentifikasi dan yang belum diidentifikasi, sehingga dapat mengetahui area-area mana yang terdapat kekosongan pengetahuan yang dapat diisi oleh seorang peneliti. Dengan melakukan tinjauan literatur ini, peneliti dapat memberikan dasar yang kokoh bagi penelitiannya dengan merujuk pada apa yang telah dilakukan sebelumnya, serta memberikan justifikasi terhadap nilai dan signifikansi dari penelitian yang peneliti lakukan.

Peneliti menggunakan sebuah penelitian yang berjudul *“The ‘one country, two systems’ solution to Taiwan: two comparative analyses”* yang ditulis oleh Yihu Li sebagai bahan acuan dalam penelitian. Penelitian ini secara mendalam menjelaskan tentang pernyataan Xi Jinping terkait solusi *“one country, two systems”* untuk Taiwan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua analisis komparatif. Bagian pertama membandingkan bentuk implementasi spesifik di Taiwan dari *“one country, two systems”* yang dipaparkan oleh Xi Jinping pada September 2014 dengan solusi *“one country, two systems”* untuk Taiwan yang dinyatakan dalam proposal *“five points”* atau lima poin Xi Jinping pada Januari 2019. Analisis kedua, Li membandingkan isi konkret dari proposal *“five points”* Xi

Jinping dengan proposal “*six points*” Deng Xiaoping, yang lebih jauh mengeksplorasi isi, jalur, dan karakteristik solusi untuk Taiwan.

Disamping itu penelitian ini juga membahas solusi reunifikasi dengan Taiwan harus dieksplorasi dan dibangun secara khusus, dan dibedakan dengan model yang diterapkan pada Hong Kong dan Makau. Menurut Li, keberhasilan penyelesaian masalah Taiwan dalam realisasi reunifikasi Cina tergantung pada penemuan dan eksplorasi dari kebijakan “*one country, two systems*”. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa Cina tidak boleh bergantung pada model yang berhasil diterapkan di Hong Kong dan Makau, karena baik dari sejarah dan karakteristiknya Taiwan berbeda dengan Hong Kong dan Makau (Li, 2020).

Selanjutnya peneliti menggunakan sebuah kajian berjudul “*Strategi Pemerintahan Xi Jinping dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok*” yang ditulis oleh Inneke dan Karina. Penelitian ini membahas tentang penolakan terhadap kebijakan “*One China*” yang dilakukan oleh Presiden Tsai Ing-wen, dan ia terus memperjuangkan kemerdekaan bagi Taiwan. Lalu, membahas bagaimana Presiden Xi Jinping dengan tegas menolak kemerdekaan Taiwan. Penulis kajian ini menggunakan konsep keamanan Buzan, Waever, dan de Wilde untuk dapat menjelaskan upaya Beijing di bawah kepemimpinan Xi Jinping dalam menanggapi pergerakan dari Taiwan. Tidak hanya melihat dari sektor politik, namun dalam penelitian ini juga membahas pada sektor militer dan juga ekonomi.

Penelitian ini juga membahas terkait hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Cina dalam melakukan reunifikasi dengan Taiwan. Salah satunya adalah intervensi yang sering dilakukan oleh Amerika Serikat ke dalam konflik ini. Hal ini dapat menjadi sebuah ancaman bagi Cina, dikarenakan hubungan yang erat antara

Amerika dan Taiwan. Amerika sering mengirimkan bantuan berupa kelengkapan militer untuk Taiwan, tentu saja ini membuat Cina merasa resah.

Fokus pembahasan lain dari penelitian ini adalah bagaimana strategi Xi Jinping dalam mengamankan kedaulatan negaranya terhadap gerak-gerik Taiwan. Hal yang paling ditekankan dalam analisis ini adalah sektor militer, politik, dan juga ekonominya. Di dalam penelitian ini kemudian dipetakan dari ketiga sektor tersebut strategi mana yang lebih efektif dan kurang efektif dalam mempertahankan kedaulatan Cina (Dewi & Dewi, 2019).

Peneliti juga menggunakan sebuah penelitian yang berjudul "*The Rise of Xi Jinping and China's New Era: Implications for the United States and Taiwan*" ditulis oleh Drew Thompson. Berbeda dengan literatur sebelumnya, penelitian ini lebih membahas terkait perubahan kebijakan luar negeri Cina pada era Xi Jinping yang lebih tegas dan membuat relasi hubungan Amerika-Taiwan merasa terancam. Drew Thompson sebagai penulis berargumen bahwa bagaimana modernisasi dari *People's Liberation Army (PLA)* atau Tentara Pembebasan Rakyat dari waktu ke waktu telah meningkatkan ancaman bagi Taiwan dan juga Amerika Serikat. Taiwan dan Amerika Serikat dapat mengatasi tantangan yang dihadapkan oleh Cina dengan cara memperkuat hubungan mereka untuk beradaptasi pada era baru Cina di bawah kepemimpinan Xi Jinping.

Sejak Xi Jinping berkuasa pada tahun 2012, kebijakan dan strategi luar negeri RRC telah mengalami transformasi yang cukup drastis dari fokus Deng Xiaoping untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri serta menghindari keterikatan dengan luar negeri yang berpotensi merugikan. Perubahan Cina pada era pemerintahan Xi Jinping ini menurut Drew, merupakan sebuah dinamika yang

menghasilkan paradigma baru di kawasan Indo-Pasifik yang berbeda dengan tantangan sebelumnya. Akan tetapi, dalam penelitian ini juga membahas terkait rencana reunifikasi Cina dan Taiwan dengan strategi Xi Jinping. Tidak hanya menyebutkan persoalan rencana reunifikasi dengan Taiwan, penelitian ini juga menunjukkan sebuah ‘ketakutan baru’ bagi Taiwan akibat dari penanganan Cina terhadap situasi kondisi di Hong Kong.

Drew juga membahas kemungkinan konsekuensi yang akan diterima Amerika Serikat jika gagal dalam membela Taiwan. Kemungkinan akan terjadi militerisasi yang tidak terkendali di seluruh wilayah. Cina mungkin mengkritik aliansi Amerika Serikat sebagai pemikiran Perang Dingin yang sudah ketinggalan zaman. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa memperdalam hubungan keamanan dengan Amerika Serikat, Jepang, India, dan negara-negara lain yang berpikiran sama merupakan cara yang paling pasti untuk menghalangi Cina. Hubungan keamanan AS-Taiwan memang sudah baik, akan tetapi masih bisa untuk ditingkatkan (Thompson, 2020).

Literatur selanjutnya yang peneliti gunakan dalam kajian ini berjudul *“Analisis Propaganda Komputasional Tiongkok terhadap Taiwan sebagai Upaya Reunifikasi Tiongkok-Taiwan Tahun 2016-2020”* yang ditulis oleh Muhammad Fadhil Hidayat Samsir. Kajian ini membahas upaya yang dilakukan oleh Cina dalam melakukan reunifikasi dengan Taiwan semaksimal mungkin. Berbeda dengan upaya yang biasa mereka lakukan seperti diplomasi, hubungan ekonomi, atau mengancam dengan militer. Dalam penelitian ini membahas Cina yang menerapkan sebuah propaganda komputasional dengan tujuan dapat mempengaruhi masyarakat Taiwan. Cina memanfaatkan media sosial seperti

Facebook dan juga *Weibo* yang merupakan sebuah media sosial Cina dimana banyak digunakan oleh publik dari Taiwan. Hal ini dilakukan agar masyarakat Taiwan terpengaruhi oleh opini yang dibuat ke publik terhadap pemerintahan yang sedang memerintah, yaitu Tsai Ing-wen dan Partai Demokratik Progresif (DPP).

Penelitian ini menarik untuk dibaca karena membahas bagaimana pemerintahan Cina mengatur informasi yang ada di wilayah mereka. Disebutkan bahwa di bawah pemerintahan Xi Jinping, Cina menyiapkan sebuah program yang dapat mengontrol internet. Bagaimana program ini dapat memblokir seluruh domain dan IP di dalam wilayah Cina. Strategi menggunakan propaganda komputasional yang dilakukan oleh Cina ini cukup memberikan beberapa dampak di Taiwan, meskipun bisa dibilang gagal untuk membuat Tsai Ing-wen terpuruk, namun cukup efektif pada pemilihan Han Kuo-yu yang maju di wilayah Kaohsiung (Syamsir, 2023).

Untuk membantu kajian peneliti, peneliti menggunakan sebuah yang berjudul “*Strategi Balancing Taiwan terhadap Tiongkok dalam Merespon Reunifikasi*” ditulis oleh Fatmawati, Kenepri, dan Muthia Darma sebagai tambahan bahan acuan penelitian. Tidak seperti literatur sebelumnya yang selalu berfokus ke dalam bagaimana upaya Cina dalam merealisasikan reunifikasi dengan Taiwan. Jurnal ini membahas dari sisi Taiwan, bagaimana cara Taiwan menghadapi keagresifan Cina yang terus menerus menyerukan penyatuan. Bagaimana Taiwan meningkatkan keamanan mereka melalui strategi *balancing* terhadap Tiongkok sebagai bentuk respon dari rencana reunifikasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dan juga analisis kualitatif untuk membantu kajian ini.

Disebutkan bahwa dalam usahanya Taiwan melakukan 2 tipe *balancing*, yaitu *balancing eksternal* dan *balancing internal*. Salah satu *balancing eksternal* yang dilakukan oleh Taiwan adalah dengan cara menjalin aliansi dengan Amerika Serikat. Untuk menghadapi ancaman Cina yang begitu kuat, Taiwan bahkan meningkatkan pembelian senjata dari Amerika Serikat di tahun 2019. Sedangkan *balancing internal* yang dilakukan oleh Taiwan adalah dengan meningkatkan anggaran militer mereka. Tentu saja peningkatan anggaran militer ini untuk mempertahankan dan memperkuat militer mereka (Fatmawati et al., 2023).

Pada literatur selanjutnya, peneliti menggunakan penelitian yang berjudul “*One Country, Two Systems and the Realization of the Complete Reunification of China: A Synthesis of Narrative Reviews*” yang ditulis oleh Chaoyi Wei. Untuk penelitian yang ini lebih luas membahas penerapan “*one country, two systems*” di Hong Kong dan Makau. Penelitian ini mengatakan bahwa “*one country, two systems*” merupakan sebuah teori konstitusional, dimana dapat menjadi sumber teori yang kuat bagi Cina untuk mencapai reunifikasi penuh. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa “*one country, two systems*” merupakan sebuah inovasi kelembagaan. Dari pengenalan konsep “*one country, two systems*” hingga pembentukan Daerah Administratif Khusus Hong Kong dan Makau, ini merupakan sebuah proses yang telah terakumulasi dari waktu ke waktu.

Selain itu penelitian ini juga menjelaskan mengenai optimalisasi dari “*one country, two systems*” di Hong Kong dan Makau dari interpretasi Hukum Dasar yang berlaku di sana. Peneliti dari jurnal ini menganggap bahwa Hukum Dasar Hong Kong dan Makau adalah jaminan institusional satu negara, dua sistem, dan optimalisasi “*one country, two systems*” tercermin dalam dimensi amandemen

Hukum Dasar Hong Kong dan Makau serta interpretasi Hukum Dasar Hong Kong dan juga Makau.

Tidak hanya itu, penelitian ini juga mendiskusikan tentang rasa optimis untuk penerapan dari kebijakan “*one country, two systems*” yang Cina usulkan kepada Taiwan, meskipun sampai saat ini masih belum berhasil diterapkan. Berbeda dengan literatur pertama yang menyatakan bahwa butuh inovasi dan eksplorasi solusi untuk menyelesaikan masalah di Taiwan. Dalam penelitian ini lebih memandang dengan optimis terkait penerapan “*one country, two systems*” yang ditawarkan oleh Cina kepada Taiwan. Memang di dalam penelitian ini diakui bahwa masalah di Taiwan sulit untuk dipecahkan karena situasinya yang kompleks. Namun, penulis dari penelitian ini tetap percaya bahwa “*one country, two systems*” merupakan pendekatan solusi terbaik yang bisa dilakukan Cina. Berkaca pada keberhasilan penerapan di Hong Kong dan juga Makau, penelitian ini mengatakan bahwa “*one country, two systems*” dapat dilakukan dengan sukses (Wei, 2023).

Dari keenam kajian literatur yang telah peneliti paparkan, bisa terlihat dengan jelas bahwa banyak sekali upaya yang telah dan masih dilakukan oleh Cina untuk dapat membuat rencana reunifikasi dengan Taiwan ini berhasil. Dari cara yang paling tradisional seperti ancaman-ancaman militer, hingga cara yang paling modern yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Namun tetap saja, Taiwan masih tetap konsisten untuk menolak usulan reunifikasi ini. Hal ini yang membedakan kajian penelitian peneliti dengan kajian penelitian sebelum-sebelumnya, terutama yang sudah peneliti tinjau di atas. Peneliti akan membahas mengenai faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penerapan kebijakan “*one country, two systems*” di Taiwan.

Tabel 2. 1. Tinjauan Literatur

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>The “one country, two systems” solutions to Taiwan: two comparative analyses.</i>	Yihu Li	Penelitian ini memiliki kesamaan pandangan tentang perbedaan masalah antara Taiwan dengan Hong Kong dan Makau.	Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian yang ditulis oleh Yihu Li adalah peneliti tidak membahas secara rinci terkait strategi dan “six points” dari Deng Xiaoping. Fokus dari penelitian Yihu Li adalah membandingkan isi konkret dari proposal “five points” yang dinyatakan oleh Xi Jinping dengan proposal “six points” yang dinyatakan oleh Deng Xiaoping. Sedangkan fokus penelitian dari peneliti adalah menganalisis penolakan-penolakan reunifikasi yang dilakukan Taiwan terhadap Cina.
2.	Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok.	Inneke Firsana Dewi dan Karina Utami Dewi	Penelitian ini memiliki persamaan dalam periode waktu bahasan, yaitu sama-sama berfokus di periode Pemerintahan Presiden Xi Jinping.	Perbedaan penelitian antara peneliti dengan literatur ini adalah pada fokus bahasan. Dalam literatur ini, penulisnya mengklasifikasikan tiga sektor yang menjadi bahan kajian, yaitu politik, ekonomi, militer.

				Sedangkan peneliti tidak membahas pada sektor ekonominya. Peneliti lebih condong pada sistem demokrasi yang diterapkan di Taiwan.
3.	The Rise of Xi Jinping and China's New Era: Implications for the United States and Taiwan.	Drew Thompson	Literatur ini memiliki persamaan dengan kajian peneliti, yaitu sama-sama fokus membahas pada era Pemerintahan Xi Jinping. Selain itu sama-sama membahas hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan.	Terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari literatur ini dengan kajian peneliti. Literatur ini membahas perubahan arah kebijakan luar negeri di masa kepemimpinan Xi Jinping, hingga membuat Amerika-Taiwan merasa terancam.
4.	Analisis Propaganda Komputasional Tiongkok terhadap Taiwan sebagai Upaya Reunifikasi Tiongkok-Taiwan Tahun 2016-2020.	Muhammad Fadhil Hidayat Samsir	Dalam literatur ini memiliki persamaan dengan kajian peneliti. Peneliti dan penulis literatur ini sama-sama membahas rencana ambisius Presiden Xi Jinping terkait reunifikasi dengan Taiwan.	Terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara literatur ini dengan kajian peneliti. Literatur ini tidak membahas upaya reunifikasi yang dilakukan Cina dari bidang militernya. Kajian yang dilakukan peneliti membahas upaya reunifikasi yang dilakukan oleh Cina dari berbagai bidang, salah satunya militer.
5.	Strategi <i>Balancing</i> Taiwan terhadap Tiongkok dalam	Fatmawati, Kenepri, dan Muthia Darma.	Literatur ini memiliki persamaan dengan kajian peneliti, yaitu sama-sama membahas	Sementara itu, literatur ini hanya berfokus pada bagaimana Taiwan merespon dan merancang strategi

	Merespon Reunifikasi.		mengenai pembelian perlengkapan senjata militer yang dilakukan Taiwan yang mereka beli dari Amerika Serikat. Selain itu, terdapat juga kesamaan dari teknik pengumpulan data yang sama menggunakan data sekunder.	untuk mengimbangi Cina.
6.	<i>“One Country, Two Systems” and the Realization of the Complete Reunification of China: A Synthesis of Narrative Reviews</i>	Chaoi Wei	Pada literatur ini terdapat persamaan dengan kajian peneliti, yaitu membahas rencana reunifikasi Cina dengan Taiwan, dan konsep “one country, two systems” sebagai tawaran yang diberikan oleh Cina terhadap Taiwan.	Untuk literatur ini, terdapat perbedaan yang cukup besar dengan kajian peneliti. Literatur ini membahas konsep “one country, two systems” dengan sangat kompleks dan mendalam, sedangkan dalam kajian peneliti tidak begitu dalam dibahas.

2.2. Kerangka Konseptual

Dalam merangkai analisis sebuah isu yang akan diselidiki, dibutuhkan sesuatu kerangka konseptual dan teoritis yang sesuai guna mempermudah dan memperkuat penulis dalam memahami dan menganalisa suatu permasalahan yang akan diteliti. Teori dan konsep yang diadopsi tentunya berasal dari para ahli akademisi yang terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan. Pada bagian ini,

peneliti menggunakan teori konstruktivisme serta konsep demokrasi dan reunifikasi.

2.2.1. Demokrasi

Demokrasi adalah sistem yang dikenal luas oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Secara umum, demokrasi diartikan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang mana rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *dēmokratia*, yang diambil dari dua kata yaitu *dēmos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan demi kepentingan pemerintahannya yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kemajuan sosial yang lebih baik. Terdapat definisi terkenal dari Abraham Lincoln mengenai demokrasi ini, ia mengartikan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (ADCO Law, 2022).

Dalam sebuah buku berjudul "*Democracy and its Critics*" yang ditulis oleh Robert A. Dahl, disebutkan bahwa proses demokrasi perlu menyediakan saluran partisipasi yang efektif dan menjamin kesetaraan dalam hak pilih bagi semua warga yang sudah dewasa dan warga negara harus mendapatkan hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, beragama, dan lain sebagainya. Dahl menyatakan bahwa setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya. Selanjutnya ada rotasi kekuasaan secara teratur dan juga damai, tidak boleh hanya ada satu orang yang secara terus-menerus memegang jabatan. Proses demokrasi juga harus membuka peluang yang

sama bagi semua orang untuk memegang jabatan politik. Dan yang paling penting adalah adanya pemilihan umum. Pemilihan umum ini tentunya dilaksanakan secara teratur dan juga melibatkan partisipasi warga negara. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan juga dipilih (Dahl, 1989).

Dalam pandangan Dahl, pemerintahan yang demokratis menyediakan proses yang tertib dan damai, di mana mayoritas warga negara dapat mendorong pemerintah untuk melakukan apa yang paling mereka inginkan dan menghindari melakukan apa yang paling mereka tidak ingin dilakukan. Namun, meskipun keyakinannya akan demokrasi merupakan cara terbaik yang tersedia untuk pengambilan keputusan kolektif, Dahl tidak pernah mengklaim bahwa mengimplementasikan cita-cita demokrasi itu mudah. Dia mengakui bahwa belum ada negara yang sepenuhnya memenuhi persyaratan teoritis dari sebuah sistem demokrasi yang sempurna. Sehingga ia berpendapat bahwa sebuah komitmen yang kuat terhadap demokrasi merupakan cara terbaik untuk melindungi hak-hak dasar (Dahl, 1989).

Samuel P. Huntington seorang ilmuwan politik di Amerika Serikat, mendefinisikan demokrasi sebagai suatu proses pengambilan keputusan kolektif yang memiliki sifat yang kuat dan mengikat, yang dibuat dan disetujui oleh warga yang dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dengan memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk bersaing dalam mendapatkan hak suara (Huntington et al., 1991). Baginya, demokrasi dianggap sebagai sebuah sistem yang memiliki manfaat positif terhadap kebebasan individu, stabilitas nasional, bahkan stabilitas internasional. Huntington menegaskan bahwa teori ini direalisasikan dengan menerapkan prosedur dan substansi demokrasi dengan benar.

Huntington menyampaikan pandangannya terhadap demokrasi bahwa idealnya, sistem demokrasi dapat beroperasi ketika rezim otoriter telah digantikan oleh rezim demokrasi yang konsolidatif, yang mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Transisi dari rezim nondemokratis (otoriter) ke rezim yang demokratis ini disebut sebagai demokratisasi. Menurut Huntington antara periode 1974 hingga 1990, lebih dari tiga puluh negara di Eropa Selatan, Eropa Timur, Amerika Latin, dan Asia bergeser dari sistem pemerintahan otoriter ke sistem pemerintahan yang demokratis. Huntington menyebut fenomena ini sebagai gelombang demokratisasi, dan di periode itu merupakan gelombang demokratisasi ketiga yang terjadi pada era modern. Gelombang pertama dimulai di Amerika pada akhir abad ke-19an dan mencapai puncaknya pada akhir Perang Dunia I, pada periode ini sekitar 30 negara telah memiliki rezim demokratis. Gelombang demokratisasi kedua dimulai ketika terjadi Pawai Mussolini di Roma pada tahun 1922, pada gelombang ini sempat terjadi penurunan yang menyebabkan hanya tersisa 12 negara demokrasi di tahun 1942. Namun kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia II dan dekolonisasi memulai gerakan kedua menuju demokrasi, yang kemudian mereda pada awal tahun 1960-an sekitar 36 negara memiliki sistem pemerintahan demokrasi. Sedangkan gelombang ketiga dimulai sejak tahun 1974, ketika masyarakat dan pemimpin politik mengakhiri sistem otoriter dan menciptakan sistem yang demokratis (Huntington, 1991).

Huntington menyebutkan beberapa faktor utama yang menjadi pemicu terjadinya gelombang demokratisasi ketiga. Pertama, masalah legitimasi rezim otoriter yang semakin menurun di seluruh dunia membuat nilai-nilai demokrasi semakin diterima. Kedua, kegagalan rezim otoriter dalam mengatasi krisis ekonomi

yang menyebabkan terjadinya peningkatan standar biaya hidup. Lalu ada efek “*Snowballing*” yaitu efek demonstratif dari transisi awal gelombang ketiga dalam menstimulasi dan memberikan contoh bagi upaya-upaya demokratisasi selanjutnya (Huntington, 1991).

Wilayah Asia sendiri mengalami gelombang demokratisasi pada tahun 1980-an dan 1990-an, yang berarti termasuk ke dalam gelombang demokratisasi ketiga. Disebutkan bahwa demokrasi yang berhasil membutuhkan warga negara yang aktif terlibat dalam politik (Almond & Verba, 1963). Warga negara yang aktif ini akan mengembangkan budaya kewarganegaraan di dalam masyarakat yang memiliki ciri-ciri budaya seperti kepercayaan, toleransi, dan kemauan untuk berkompromi. Protestanisme secara umum diidentifikasi sebagai budaya politik yang memiliki ciri-ciri kebudayaan seperti itu. Asia mungkin merupakan benua terakhir yang mengalami demokratisasi, karena kurangnya tradisi protestan atau protes politik (demonstrasi) (Pye, 1985).

Pada tahun 1980-an dan juga 1990-an, banyak terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Asia yang disebabkan oleh krisis legitimasi dalam rezim yang sedang berkuasa. Para demonstran menuntut pengunduran diri para pemimpin otoriter, pencabutan darurat militer, pemilihan umum yang bebas, atau perubahan konstitusional, tergantung pada kondisi politik masing-masing negara. Aksi ini terjadi di negara-negara Asia secara berurutan, di Filipina pada tahun 1986, di Taiwan tahun 1986-1987, Thailand tahun 1991-1992, di Indonesia pada tahun 1998, dan masih banyak lagi. Demonstrasi yang terjadi di Asia pada tahun-tahun ini memiliki suatu kesamaan. Mahasiswa yang memicu serangkaian demonstrasi politik. Di Korea Selatan, mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut pemilihan

presiden secara langsung dan juga menuntun pengunduran diri Presiden Chun Doo Hwan. Di Indonesia, para mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa ini bahkan memengaruhi kelompok lain seperti masyarakat kelas menengah, buruh, petani, dan juga kelompok lainnya (Lee, 2002).

Ketika gejolak politik semakin tak terkendali, rezim-rezim yang berkuasa akhirnya memilih untuk tidak menekan gerakan-gerakan oposisi. Sebaliknya, mereka membuat kompromi besar dengan gerakan pro-demokrasi, yang kemudian membuka liberalisasi politik. Bentuk liberalisasi politik paling umum di Asia adalah deklarasi atau pengumuman khusus yang menerima tuntutan demokratis dari para pengunjuk rasa. Di Mongolia, Politbiro mengumumkan pada bulan Maret 1990 bahwa mereka melepaskan monopoli Partai Komunis atas kekuasaan dan akan bekerja sama dengan parta-partai oposisi untuk menyusun konstitusi baru. Juga terjadi transisi menuju demokrasi yang dimulai dengan pengumuman pengunduran diri para pemimpin otoriter Er-shad di Bangladesh, Suchida di Thailand, dan Soeharto di Indonesia. Setelah liberalisasi politik, negara-negara Asia ini berhasil menyelenggarakan pemilihan umum demokratis yang mengantarkan pada bentuk pemerintahan yang demokratis (Lee, 2002). Termasuk Taiwan yang berhasil melakukan pemilihan umum secara demokratis untuk pertama kalinya pada tahun 1996.

Dalam proses demokratisasi yang terjadi di Taiwan berawal dari penurunan legitimasi rezim otoriter yang dipimpin oleh Chiang Kai-sek pada saat itu. Pada kepemimpinan Chiang Kai-sek, melakukan penindasan terhadap rakyat dan juga berbagai korupsi terjadi. Rezim ini juga memonopoli sejumlah besar bisnis, mereka melakukan reformasi tanah yang menghilangkan bisnis pribumi karena dapat

menekan legitimasi rezim. Mereka juga menerapkan pengekanan yang ketat terhadap bisnis secara umum. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh rezim Chiang Kai-sek ini merugikan sebagian besar masyarakat di sana. Hal ini kemudian memunculkan berbagai gerakan oposisi Tangwai, Tangwai berarti di luar kekuasaan Kuomintang. Gerakan ini dibentuk oleh sejumlah aktivis pro demokrasi dan HAM, yang digunakan untuk mengkritisi kebijakan rezim (Auklend, 2022). Tangwai muncul untuk pertama kalinya sebagai kekuatan oposisi politik pada pemilihan umum lokal tahun 1997. Tangwai mengupayakan pencabutan darurat militer dan kemerdekaan Taiwan hingga darurat militer dicabut pada tahun 1987 (Lee, 2002). Para aktivis Tangwai ini juga yang kemudian mendirikan Partai Progresif Demokrat (DPP) (Auklend, 2022).

Huntington di dalam bukunya yang berjudul "*How Countries Democratize*" juga menjelaskan bagaimana sifat rezim otoriter berhubungan dengan sifat proses transisi/demokratisasi. Sifat-sifat dari rezim otoriter yang tidak disukai oleh oposisi maupun rakyat, seperti para pemimpin otoriter yang percaya bahwa mereka dan rekan-rekan mereka tidak akan kehilangan jabatan, memunculkan para transformer atau pembaharu. Para pembaharu ini percaya bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang benar untuk negara mereka. Munculnya para pembaharu yang demokratis dalam sistem otoriter menciptakan kekuatan tingkat pertama untuk perubahan politik. Menurut Huntington, para pembaharu demokratis ini harus memperoleh kekuasaan di dalam rezim otoriter. Ketika mereka mendapatkan kekuasaan, mereka dapat memimpin transisi menuju pemerintahan yang demokratis dari rezim otoriter (Huntington, 1991). Partai DPP saat itu hadir sebagai oposisi yang menentang partai Kuomintang yang saat itu berkuasa. Partai yang berawal dari

sebuah gerakan, yang kemudian masuk dalam ke dalam kekuasaan rezim. DPP terus mendorong kebebasan berekspresi, gender, kesetaraan, hak-hak petani dan pekerja, serta realisasi lebih lanjut dari demokrasi Taiwan. Hingga akhirnya Taiwan berhasil menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis sampai saat ini (Auklend, 2022).

2.2.2. Reunifikasi

Menurut *Cambridge Dictionary*, reunifikasi merupakan proses penggabungan dua bagian dari sesuatu, khususnya suatu negara yang sebelumnya terpecah. Negara-negara tersebut sebelumnya merupakan satu entitas bangsa yang terbagi secara politis, identitas politik, ekonomi, dan sosial. Seperti halnya yang terjadi antara Cina dan juga Taiwan, kedua wilayah ini awalnya merupakan satu bangsa negara yang kemudian ‘terpecah’ akibat adanya perbedaan ideologi negara. Konflik ini bermula karena terjadinya perang saudara antara Partai Nasionalis (KMT) dengan Partai Komunis (PKC) untuk berebut pemerintahan dengan ideologi yang mereka pegang, perbedaan ideologi ini masih bertahan hingga sekarang.

Reunifikasi merupakan sebuah proses yang memakan waktu yang bertujuan untuk mengatasi ketidakpercayaan dan meningkatkan pemahaman antara pihak-pihak terlibat, dengan tujuan menyelesaikan konflik secara damai (Zulkarni, 2018). Hal ini yang sedang diupayakan oleh Cina untuk dapat menyatukan kembali Taiwan ke dalam wilayah teritorial mereka. Salah satu cara yang dilakukan oleh Cina adalah dengan menawarkan kebijakan “*one country, two systems*”, di mana nantinya Taiwan akan menjadi salah satu Daerah Administratif Khusus. Wilayah lain yang sudah memiliki status Daerah Administratif Khusus di daratan Cina adalah Hong Kong dan Makau. Cina menjadikan kasus keberhasilan dari penerapan “*one*

country, two systems” di Hong Kong dan Makau sebagai ‘model’ atau acuan untuk diterapkan juga pada Taiwan.

Pokok permasalahan utama dalam proses reunifikasi adalah bagaimana sebuah negara dapat mempersiapkan diri dan menciptakan hari-hari yang penuh perdamaian dan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, Cina telah menawarkan sebuah solusi bagi Taiwan yaitu dengan “*one country systems*”. Namun, Taiwan menolak segala usulan yang Cina berikan untuk melakukan reunifikasi. Taiwan secara tegas menegaskan mereka merupakan negara independen yang berdaulat.

Dalam mewujudkan reunifikasi, terdapat beberapa skenario yang dapat digunakan sebagai acuan. Skenario reunifikasi ini diklasifikasikan menjadi empat jenis. Pertama ada reunifikasi melalui penyerapan, reunifikasi jenis ini dimaksudkan dengan melakukan pengambil alihan suatu negara oleh negara lainnya. Kedua ada reunifikasi secara damai, reunifikasi ini dilakukan dengan adanya konsensus bersama yang dilakukan oleh kedua negara. Ketiga ada reunifikasi melalui perang, reunifikasi ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan. Reunifikasi melalui campur tangan asing, dalam proses reunifikasi ini ada campur tangan pihak ketiga sebagai penengah (Pollack, 2001).

Dalam upayanya agar reunifikasi dengan Taiwan dapat terjadi, Cina sudah melakukan beberapa jenis skenario. Dimulai dari reunifikasi secara damai, “*One Country, Two Systems*” merupakan salah satu bentuk upaya reunifikasi secara damai yang dilakukan oleh Cina kepada Taiwan. Namun, Cina juga melakukan

upaya reunifikasi dengan menggunakan kekuatan militer. Ketika Taiwan menolak rencana reunifikasi Cina, Cina meningkatkan eskalasi militer di Selat Taiwan.

2.2.3. Konstruktivisme

Konstruktivisme muncul pada akhir 1980-an dan awal 1990-an dibawa oleh sejumlah pemikir seperti Nicholas Onuf, Alexander Wendt, Emanuel Adler, Friedrich Kratochwil, John Gerard Ruggie, dan Peter Katzenstein, konstruktivisme merupakan sebuah teori sosial politik internasional yang menyoroiti proses konstruksi sosial dalam urusan dunia, berbeda dengan pandangan kaum neo-realis yang mengemukakan bahwa politik internasional dipengaruhi oleh perilaku para aktor egois yang mengambil keputusan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dengan melakukan perhitungan utilitarian guna memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian mereka. Berakhirnya Perang Dingin menjadi titik awal berkembangnya aliran pemikiran konstruktivis dalam bidang Hubungan Internasional yang menyebabkan perubahan besar-besaran dalam perdebatan-perdebatan yang ada dalam studi Hubungan Internasional. Inti dari argumen konstruktivisme melibatkan kata kunci seperti “wacana”, “norma”, “identitas”, dan “sosialisasi” yang secara luas diterapkan dalam diskusi kontemporer mengenai berbagai isu yang menarik perhatian internasional, seperti globalisasi, hak asasi manusia, kebijakan keamanan, dan masih banyak lagi (Behraves, 2011).

Alexander Wendt berasumsi bahwa hampir semua aspek kehidupan internasional seperti diplomasi, konflik, peperangan, perdamaian, dan sebagainya merupakan sebuah konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia. Sebagai hasil dari konstruksi sosial, kejadian-kejadian internasional seperti konflik, negosiasi,

konfrontasi militer, dan perdamaian terjadi karena ada maksud dan tujuan tertentu. Peristiwa-peristiwa tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh kepentingan aktor-aktor yang terlibat, norma-norma yang ada, identitas budaya, dan simbol-simbol linguistik yang digunakan. Sehingga, meskipun peristiwa-peristiwa yang mungkin terlihat sebagai peristiwa yang tetap atau stabil, sebagai hasil dari proses konstruksi, semuanya dapat berubah sesuai dengan keadaan tertentu.

Dalam sebuah buku berjudul *Studi dan Teori Hubungan Internasional* karya Bob Sugeng Hadiwinata, ia menjelaskan bahwa dalam konteks pembahasan mengenai peristiwa-peristiwa dalam hubungan internasional hasil dari konstruksi sosial, konstruktivisme membaginya ke dalam beberapa tema yang saling berkaitan. Pertama, konstruktivisme menekankan bahwa hasil dari konstruksi sosial bukanlah realitas objek tunggal, tetapi merupakan produk yang beragam dalam bentuknya, tergantung pada konteks yang ada. Pendekatan konstruktivisme mengakui bahwa baik konflik maupun perdamaian dapat berubah menurut konteks budaya tertentu. Kedua Bob menyatakan fokus konstruktivisme terletak pada dimensi sosial dalam hubungan internasional yang menyoroti faktor-faktor seperti norma, nilai, aturan budaya, dan simbol linguistik sebagai penentu karakter hubungan internasional. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Christian Reus-Smit, aktor dan struktur harus saling memperkuat satu sama lain. Norma, nilai, budaya, dan simbol linguistik membentuk identitas, kepentingan, dan intensi aktor, namun struktur (seperti kekuasaan, rivalitas, atau persahabatan) tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya usaha aktor untuk mewujudkannya. Ketiga, konstruktivisme meyakini bahwa politik internasional bukanlah realitas objek yang berdiri sendiri, tetapi merupakan “dunia yang kita ciptakan”. Dalam perspektif konstruktivisme, politik

internasional terbentuk melalui proses interaksi antara aktor-aktor yang dipengaruhi oleh kepentingan, identitas, intensi/maksud, dan simbol linguistik yang akhirnya membentuk hubungan seperti “persahabatan” atau “rivalitas” (Hadiwinata, 2017).

Friedrich Kratochwil dalam bukunya yang berjudul *“Rules, Norms, and Decision; on the Condition of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs”*, menyebutkan bahwa dinamika kehidupan bersama dalam komunitas internasional dipandang sebagai sebuah “proses pembelajaran” yang melibatkan interaksi antar subjek yang dibentuk oleh identitas, kepentingan, bahasa, dan maksud yang membentuk pola-pola hubungan tertentu sebagai “kawan” atau “musuh”. Berbeda dengan pendekatan positivisme yang menganggap hubungan antar-bangsa sebagai hasil dari upaya untuk mencapai kepentingan semata, konstruktivisme memahami bahwa hubungan internasional melibatkan faktor-faktor yang lebih kompleks, termasuk norma, identitas, intensi, serta bahasa.

Lebih jelasnya, konstruktivisme menurut Kratochwil semakin dekat kedekatan identitas, kepentingan, intensi/maksud dan bahasa antara dua negara serta semakin jelas pemahaman mengenai maksud suatu negara, maka semakin mudah bagi negara-negara tersebut untuk memutuskan apakah akan menjalin hubungan yang bersahabat atau menganggapnya sebagai musuh/rival. Sebaliknya, semakin besar perbedaan identitas, nilai, norma, bahasa suatu negara, maka semakin mudah bagi suatu negara untuk menetapkan negara tersebut sebagai rival/musuh (Kratochwil, 1989).

Asepek identitas menjadi aspek yang paling penting dalam menjawab penolakan taiwan terkait penerapan “*one country, two system*” sebagai upaya Cina melakukan reunifikasi. Taiwan dan Cina menganut ideologi yang berbeda, Taiwan menerapkan ideologi demokrasi sedangkan Cina menerapkan ideologi komunis otoriter. Taiwan menolak “*one country, two systems*” karena khawatir akan kehilangan hak-hak demokratis dan juga kebebasan yang mereka miliki saat ini.

Dalam aspek kepentingan (*interest*), Taiwan menolak “*One Country, Two Systems*” karena konsep tersebut tidak mencerminkan kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan nasional Taiwan. Kepentingan Taiwan adalah mempertahankan pemerintahan yang demokratis, stabilitas sosial, serta kemakmuran ekonomi. Mempertahankan otonomi politik dan kebebasan dari campur tangan Cina juga merupakan prioritas penting bagi pemerintah dan masyarakat Taiwan. Bagi Taiwan, demokrasi telah menjadi bagian dari diri mereka yang tidak dapat dinegosiasikan (Tsai, 2021).

Sedangkan pada aspek *intention* atau maksud, Taiwan dengan jelas bermaksud menjadi negara yang berdaulat dan independen. Dengan adanya “*One Country, Two Systems*” yang ditawarkan oleh Cina, jelas bertentangan dengan maksud yang mereka inginkan. Lalu yang terakhir ada aspek bahasa (*language*), pemerintah Taiwan secara konsisten mengatakan pada komitmen mereka terhadap pemerintahan sendiri, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dalam merespon seruan-seruan Cina terkait upaya reunifikasi dan juga tawaran *One Country, Two systems* kepada Taiwan, pihak Taiwan juga selalu konsisten dan tegas bahwa mereka menolak untuk bersatu kembali dengan Cina.

Sejalan dengan pemikiran Kratochwil, terkait penelitian mengapa reunifikasi lewat strategi “*One Country, Two Systems*” dengan Taiwan masih belum berhasil diterapkan. Dalam pandangannya, Kratochwil mengatakan bahwa semakin dekat kedekatan identitas, kepentingan, maksud dan juga bahasa antara dua negara, maka semakin mudah bagi negara-negara tersebut dapat memutuskan untuk menjalin hubungan persahabatan. Begitupun sebaliknya, semakin besar perbedaan identitas, kepentingan, maksud, dan bahasa suatu negara, maka semakin mudah juga bagi suatu negara menetapkan negara tersebut sebagai musuh/rival. Keadaan ini yang terjadi antara Cina dan juga Taiwan, terdapat perbedaan besar dari identitas kedua negara tersebut. Taiwan dengan ideologi demokrasinya merasa tidak cocok dengan ideologi komunis yang diterapkan di Cina, sehingga ini menjadi alasan yang paling dasar bagi Taiwan untuk menolak upaya reunifikasi yang dilakukan oleh Cina. Begitupula pada aspek kepentingan, maksud, dan bahasa antara Taiwan dan Cina tidak ada kesamaan. Berdasarkan pendekatan konstruktivisme Kratochwil, penolakan Taiwan terhadap tawaran “*One Country, Two Systems*” didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang ada antara Cina dan Taiwan.

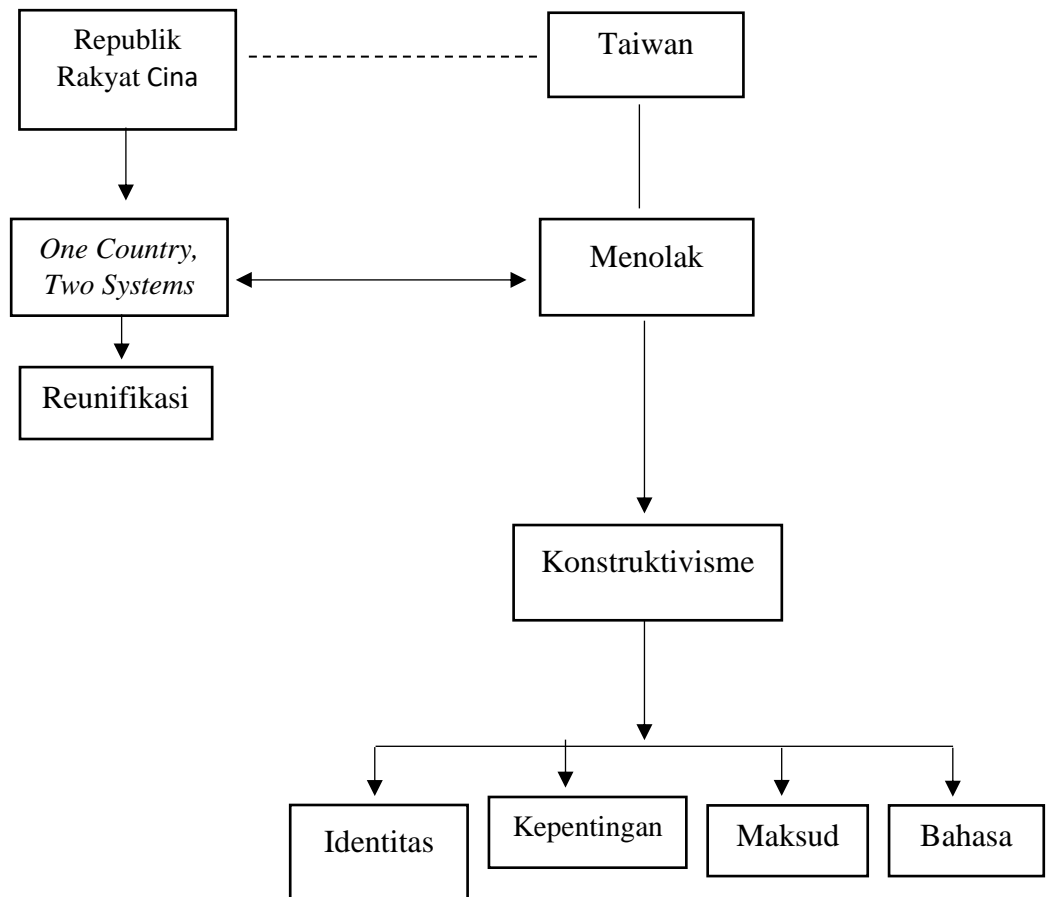
2.3. Asumsi Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti buat serta penjelasan dari konsep dan teori yang sudah peneliti jelaskan, peneliti memiliki sebuah asumsi terkait rumusan masalah dari penelitian ini. Peneliti berasumsi bahwa kebijakan “*one country, two systems*” yang ditawarkan oleh Cina sebagai upaya agar Taiwan menerima rencana reunifikasi masih belum berhasil diterapkan, padahal kebijakan ini berhasil diterapkan di Hong Kong dan Makau adalah karena terdapat beberapa perbedaan aspek antara Cina dan Taiwan. Perbedaan tersebut adalah identitas,

kepentingan, maksud, dan juga bahasa. Dalam aspek identitas Cina menganut ideologi komunis otoriter, yang mana nilai-nilai tersebut tidak sejalan dengan ideologi demokratis yang dijalankan oleh Taiwan. Selanjutnya dalam hal kepentingan, Taiwan berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan pemerintahan demokratis mereka. Sedangkan pada aspek maksud, Taiwan bermaksud untuk menjadi negara yang independen dan berdaulat. *One Country, Two Systems* yang ditawarkan Cina jelas bertentangan dengan maksud Taiwan. Terakhir, dalam aspek bahasa Taiwan selalu konsisten dan tegas mengatakan bahwa mereka menolak untuk bersatu kembali dengan Cina. Perbedaan dari aspek-aspek ini yang menjadi alasan Taiwan menolak rencana reunifikasi Cina dan *One Country, Two Systems* masih belum berhasil diterapkan di Taiwan.

2.4. Kerangka Analisis

Gambar 2. 1. Kerangka Analisis



Sumber: Peneliti